



LAPORAN HASIL PELAKSANAAN SURVEI INDEKS
PERSEPSI KORUPSI
PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN
TRIWULAN IV TAHUN 2022



LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN SURVEI INDEKS PERSEPSI KORUPSI DI PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

Disahkan di Medan
Pada Hari Jumat, 13 Januari 2023

Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan



Asril Siagian, S.H., M.H.

Letkol Cnk NRP 11990003550870

Management Representative

Wintar Limbong, S.Kom
Nip. 198402102011011013

DAFTAR ISI

BABI	1
PENDAHULUAN	1
1.1. LatarBelakang.....	1
1.2. MaksudDanTujuan	2
1.3. LandasanHukum	2
1.4. RencanaKerja.....	3
BABII	5
METODOLOGI	5
2.1. MetodePenelitian	5
2.2. PopulasiDanSampel	5
2.3. Lokasi Penelitian DanUnitAnalisis	5
2.4. Teknik Pengumpulan Data DanQualityControl	6
2.5. TeknikAnalisisData	6
2.6. Tahapanpelaksanaan	7
BABIII	9
INDEKS PERSEPSI KORUPSI	9
3.1. Profilresponden	9
3.2. Indeks persepsi korupsiperindikator.....	12
3.3. Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan Militer I-02Medan	18
3.4. Persepsi responden terhadap kualitas pelayanan Satuan Kerja pada Pengadilan MiliterI-02Medan.....	20
BABIV	21
PENUTUP	21
4.1. Kesimpulan.....	21
4.2. Rekomendasi.....	21

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Satuan Kerja pada Pengadilan Militer I-02 Medan berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik.

Komitmen tersebut mengacu amanah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2017 serta mengacu kepada Peraturan Menteri PAN & RB 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan disusunnya indeks persepsi anti korupsi yang menjadi salah satu parameter Pemerintahan yang bersih dan melayani.

Pengadilan Militer I-02 Medan merupakan satuan kerja yang melaksanakan peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis serta mengelola sumber daya yang cukup besar.

Pengadilan Militer I-02 Medan yang akan ditetapkan oleh Ditjen untuk menjadi lokasi *Pilot Project* menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, perlu memperoleh masukan dari masyarakat menyangkut pelayanan di lingkungannya.

ZI menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani menitikberatkan pada Integritas penyelenggara

dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Integritas Penyelenggara pelayanan publik akan dinilai diantaranya dapat dilihat dari potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya diluar tarif resmi yang telah ditetapkan.

1.2. Maksud Dan Tujuan

Maksud Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi pada Pengadilan Militer I-02 Medan ini adalah sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme.

Tujuan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi adalah tersusunnya rekomendasi terkait kajian menuju zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.

1.3. Landasan Hukum

- a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
- b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU no 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- c) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- d) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- e) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani.
- f) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan

Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014.

- g) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.

1.4. Rencana Kerja

1.4.1. Persiapan

Sebelum melaksanakan survei persepsi korupsi beberapa persiapan yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut.

- Penetapan Pelaksana
Dilaksanakan sendiri, survei dapat dilaksanakan secara mandiri oleh penyelenggara pelayanan dengan SDM yang dimilikinya
- Penyiapan Bahan
 - a. Kuesioner.
 - b. Bagian dari Kuesioner/Pengantar
 - c. Kelengkapan peralatan.
- Penetapan Responden, Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data
 - a. Jumlah Responden.
 - b. Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data.
- Penyusunan Jadwal
Penyusunan rencana dan pelaksanaan survei dilakukan.

1.4.2. Pelaksanaan Pengumpulan Data

- Isian data terhadap 10 unsur pertanyaan yang telah ditetapkan di dalam kuesioner.
- Pengisian Kuesioner oleh responden yang mendapatkan penjelasan terlebih dahulu dari petugas dan hasilnya dikumpulkan di tempat yang telah

disediakan.

- Pengujian kualitas dan validitas data.
- Data pendapat responden yang terisi dalam kuesioner kemudian dikompilasi dan dipilah berdasarkan umur, jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan sebagai bahan dalam analisis obyektivitas responden.

1.4.3. Metode Survei

Survei dilaksanakan dalam interval waktu per 3 bulan (empat kali dalam satu tahun).

BAB II

METODOLOGI

2.1. Metode Penelitian

Penelitian Indeks Persepsi Korupsi (IPK) ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain yang digunakan dalam penelitian tersebut.

Deskriptif kuantitatif bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk menggambarkan karakteristik individu atau kelompok yang menjadi unit analisis dalam penelitian.

2.2. Populasi Dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menggunakan layanan di Satuan Kerja Pengadilan Militer I-02 Medan. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *accidental sampling*. *Accidental sampling* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan Tim Survei dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.

2.3. Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap kejadian atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari obyek yang diteliti agar didapat data-data penelitian yang akurat, dalam hal ini yaitu Kantor Pengadilan Militer I-02 Medan.

Unit analisis adalah sesuatu yang berkaitan dengan fokus masalah yang diteliti dalam hal ini adalah proses pemberian layanan di Pengadilan Militer I-02 Medan.

2.4. Teknik Pengumpulan Data Dan Quality Control

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan melalui instrumen kuesioner yang diisi tanpa wawancara tatap muka. Pengumpulan data dilaksanakan pada rentang waktu satu bulan atau data minimal 60 responden. Selanjutnya data dikumpulkan oleh petugas pelaksana yang dibekali dengan pelatihan.

Kerja petugas pelaksana akan diawasi oleh pengawas (Hakim Pengawas Pengadilan Militer I-02 Medan). Hakim Pengawas Pengadilan Militer I-02 Medan akan mengecek kerja petugas pelaksana saat berkomunikasi dengan responden, membagikan dan mengumpulkan kuesioner, meneliti kuesioner, serta sekaligus memastikan apakah responden benar-benar disurvei secara tepat oleh petugas, dan bertanggung jawab terhadap hasil perhitungan survei IPK.

2.5. Teknik Analisis Data

Analisis data untuk menentukan *indeks korupsi* menggunakan teknik statistik deskriptif. Data persepsi diukur dengan menggunakan skala penilaian antara 1 – 6. Dimana nilai 1 merupakan skor persepsi paling rendah dan nilai 6 merupakan skor persepsi paling tinggi dan mencerminkan kualitas birokrasi yang bersih dan baik dalam melayani.

Data persepsi korupsi disajikan dalam bentuk skoring / angka absolut agar diketahui peningkatan / penurunan indeks persepsi korupsi masyarakat atas pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya. Teknik analisis perhitungan

Indeks Persepsi Korupsi pada kuesioner dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pertama, menentukan bobot total dari masing-masing indikator yang digunakan dalam penelitian ini. **Kedua**, mencari bobot rata-rata setiap indikator.

Skala indeks tiap unsur berkisar antara 1 – 6 yang kemudian dikonversikan ke angka 0-100.

Skala indeks persepsi korupsi antara 1 – 6 yang artinya mendekati nilai 4 maka persepsi korupsi makin baik semakin BERSIH DARI KORUPSI.

2.6. Tahapan pelaksanaan

Sebelum tim melakukan survei lapangan, dilakukan beberapa tahapan agar instrumen yang dipergunakan dapat diaplikasikan sesuai realitas lapangan. Adapun alur penyusunan *tools* untuk survei persepsi korupsi ini dapat digambarkan dalam bagan di bawahini:

Tabel 1

Model alur penyusunan survei IPK menuju Zona Integritas



Tabel 2
Ruang lingkup survei Indeks Presepsi Korupsi

No	Ruang lingkup
1	Manipulasi Peraturan
2	Penyalahgunaan Jabatan
3	Menjual Pengaruh
4	Transparansi Biaya
5	Transaksi Rahasia
6	Biaya Tambahan
7	Hadiah
8	Transparansi Pembayaran
9	Percaloan
10	Perbuatan Curang

Tabel 3
Nilai Persepsi

Nilai Persepsi	Nilai Interval Konversi IPK	Mutu	Kinerja
1	0.00 - 17.00	1	Sangat Korupsi
2	17.01 - 33.00	2	Korupsi
3	33.01 - 49.00	3	Cukup bersih dari korupsi
4	49.01 - 65.00	4	Kurang Bersih dari Korupsi
5	65.01 - 81.00	5	Cukup Bersih dari Korupsi
6	81.01 - 100	6	Bersih dari korupsi

BAB III

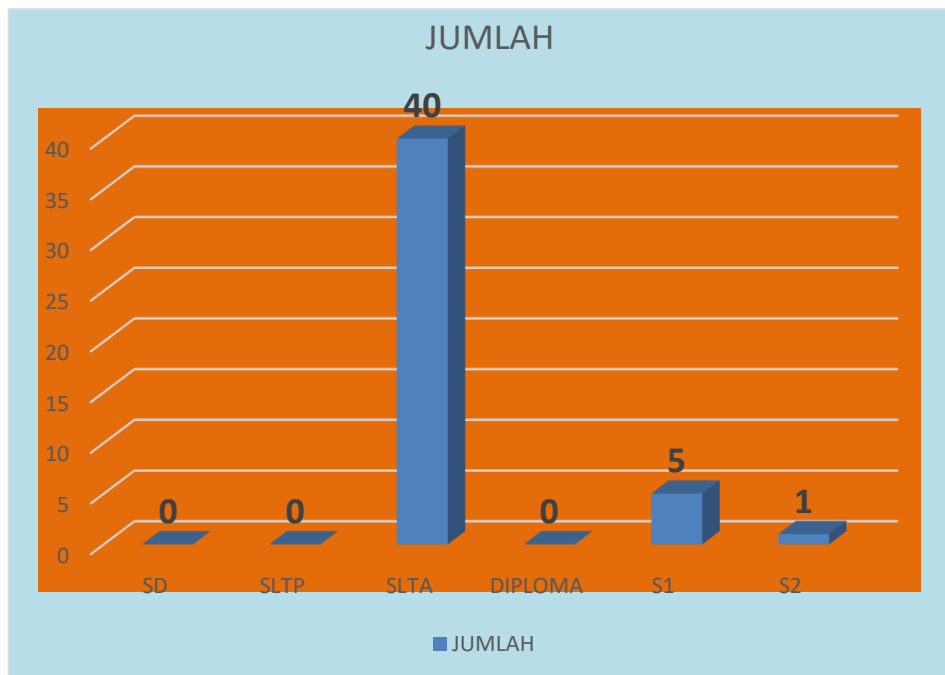
INDEKS PERSEPSI KORUPSI

3.1. Profil responden

3.1.1. Tingkat pendidikan responden

Dari hasil survei yang telah dilakukan memperoleh gambaran bahwa dari latar belakang pendidikan, pengakses layanan di Satuan Kerja pada Pengadilan Militer I-02 Medan mayoritas memiliki latar sekolah tingkat lanjutan (SLTA).

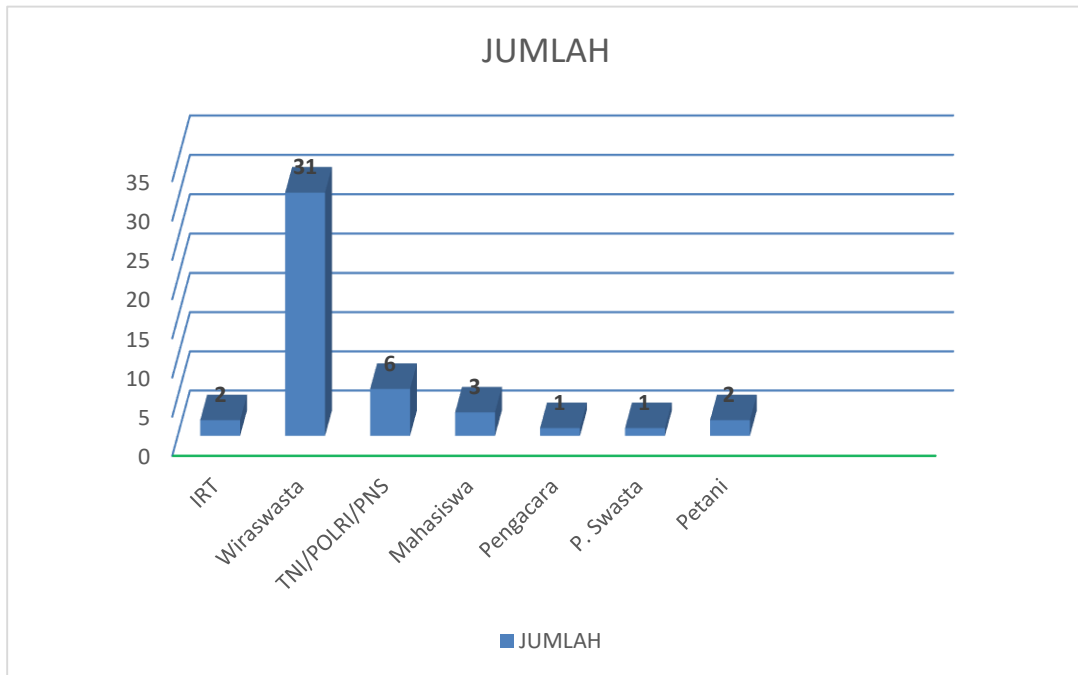
Tabel 4.
Tingkat pendidikan responden



3.1.2. Pekerjaan responden

Dari sisi jenis pekerjaan responden, menunjukkan bahwa sebesar 67,40 % responden pengguna layanan Satuan Kerja pada Pengadilan Militer I-02 Medan memiliki pekerjaan sebagai Wiraswasta.

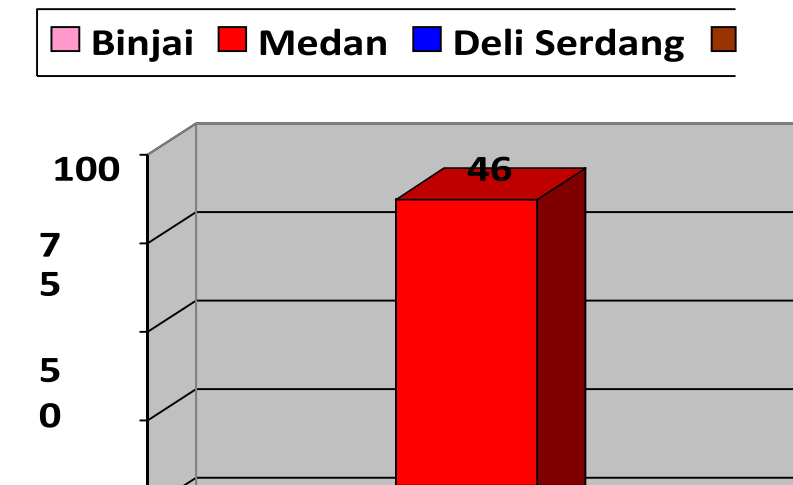
Tabel 5.
Jenis pekerjaan responden



3.1.3. Domisili responden

Dari data yang terkumpul selama survei, diperoleh data bahwa berdasar domisili, responden paling banyak berasal dari Medan dengan 100%.

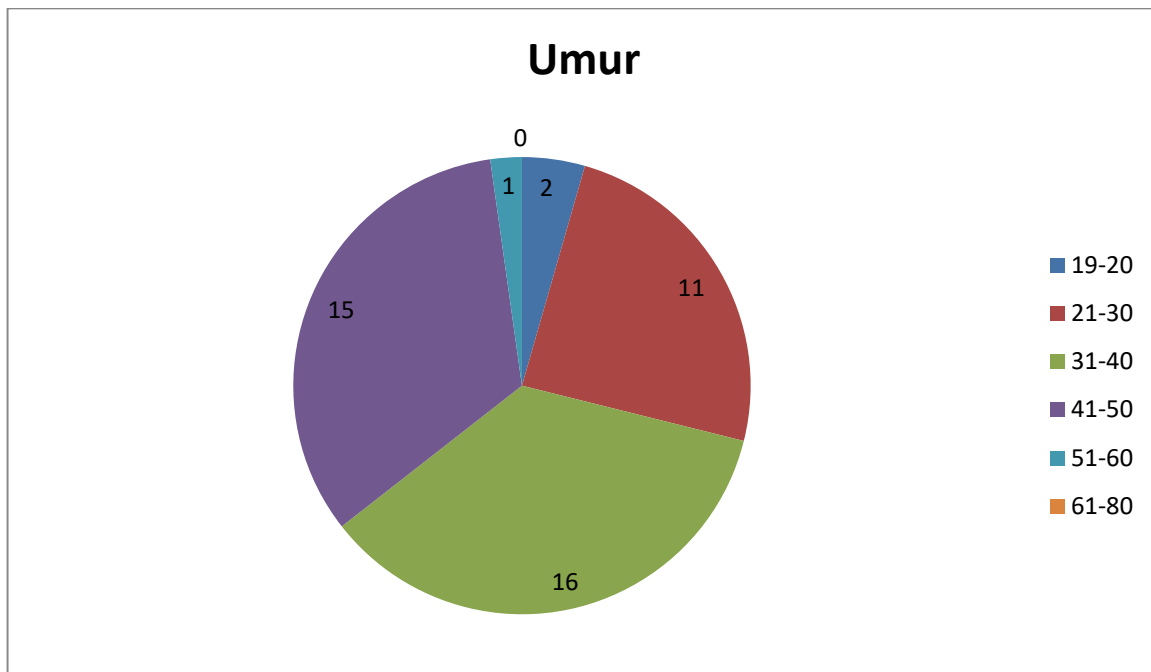
Tabel 6
Domisili Responden



3.1.4. Kelompok usia responden

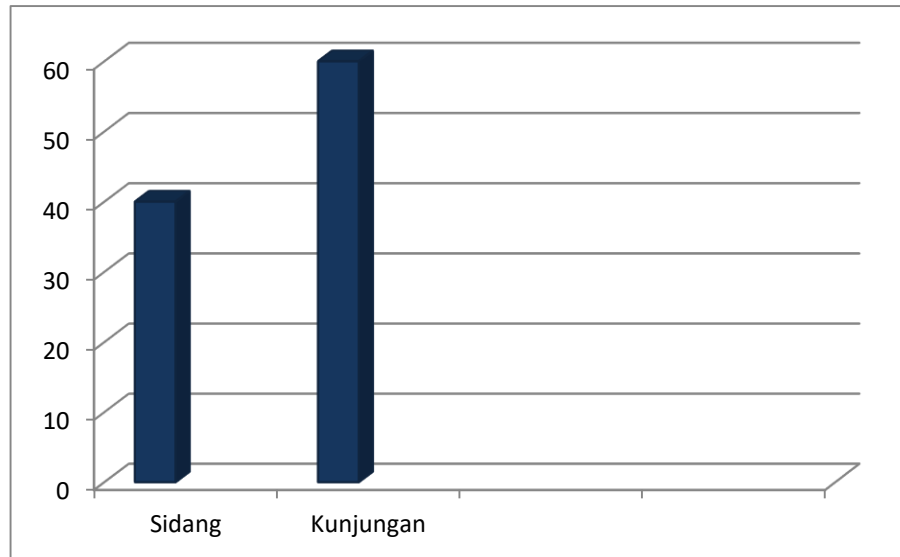
Sementara itu jika melihat responden pengguna layanan Satuan Kerja pada Pengadilan Militer I-02 Medan berdasarkan kelompok usia, menunjukkan bahwa mayoritas pengguna layanan berada dalam kelompok usia produktif yaitu pada usia antara 31 tahun s/d 50 tahun. Bagi kelompok usia di atas 51 tahun, jumlah responden semakin mengecil, demikian pula kelompok usia di bawah 21 tahun.

Tabel 7.
Usia responden



3.1.5. Layanan yang digunakan

Layanan Kunjungan dan Sidang menjadi jenis pelayanan yang paling banyak dipergunakan oleh responden, yaitu sebesar 60% 40%.



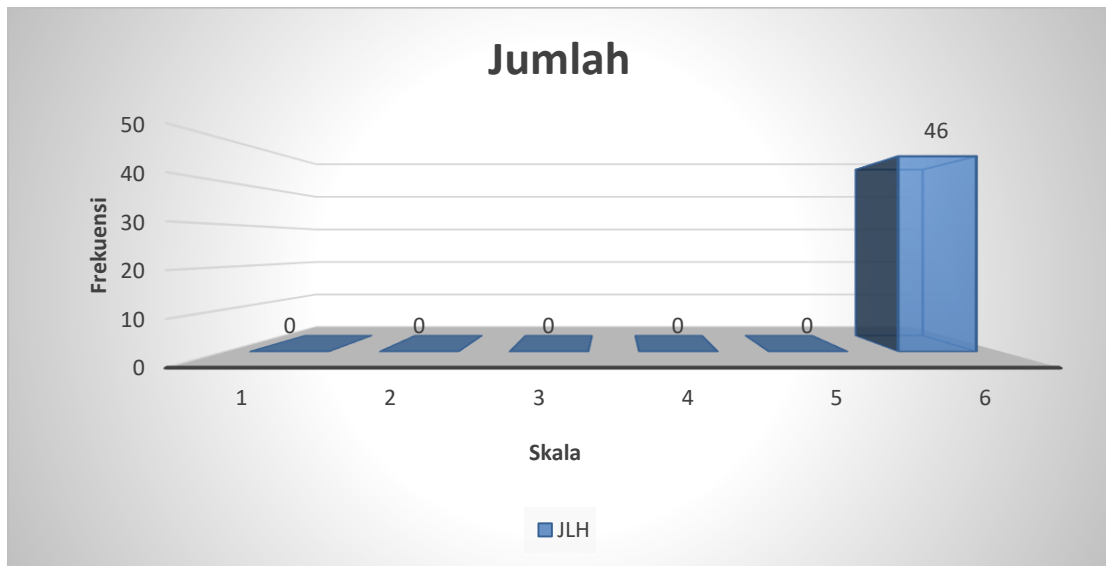
3.2. Indeks persepsi korupsi perindikator

3.2.1. Indikator Manipulasi Peraturan

Dari skala 1 sampai 6, hasil persepsi responden pada indikator Manipulasi Peraturan ini menunjukkan hasil pada index 6,00

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Militer I-02 Medan bersih dari korupsi.

Tabel 9.
Indeks pada indikator manipulasi peraturan



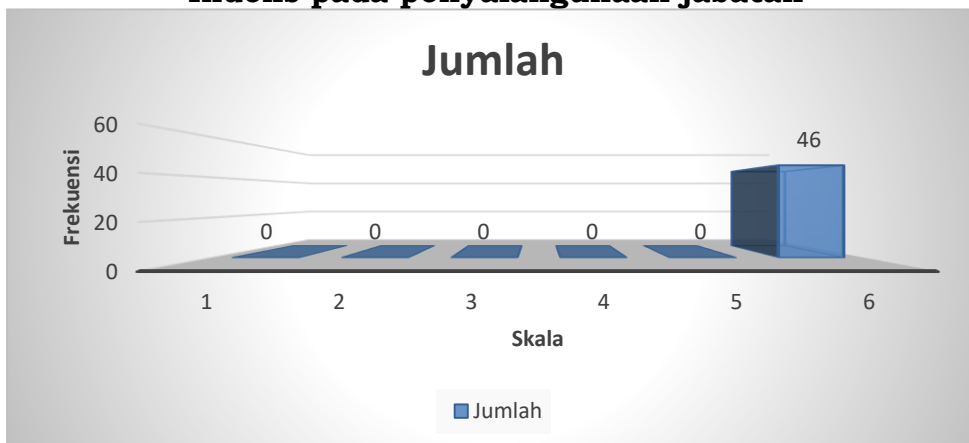
Jawaban Responden

322. Indikator Penyalahgunaan Jabatan

Dari skala 1 sampai 6, hasil persepsi responden pada indikator Penyalahgunaan Jabatan ini menunjukkan hasil pada index 6.00.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Militer I-02 Medan bersih dari korupsi.

Tabel 10.
Indeks pada penyalahgunaan jabatan



Jumlah Responden

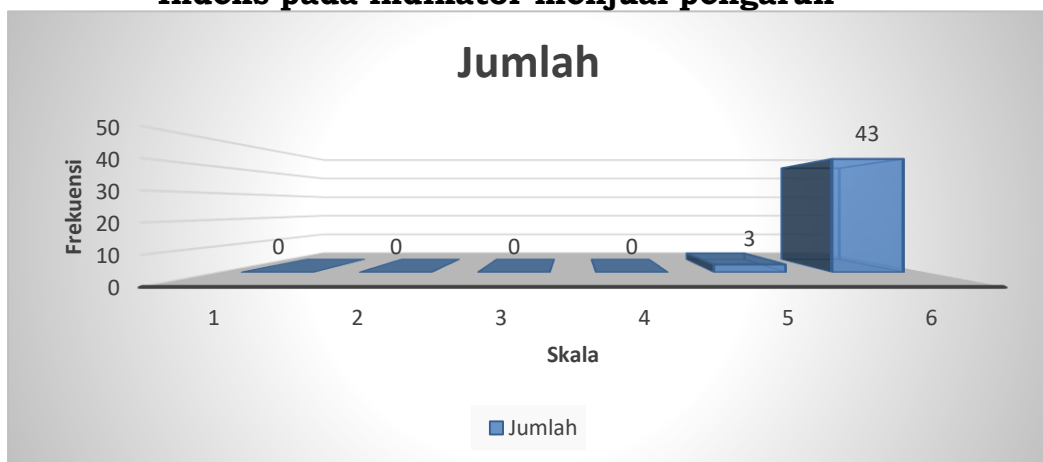
323. Indikator Menjual Pengaruh

Dari skala 1 sampai 6, hasil persepsi responden pada indikator Menjual Pengaruh ini menunjukkan hasil pada index 5.89.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Militer I-02 Medan bersih dari korupsi.

Tabel 11.

Indeks pada indikator menjual pengaruh



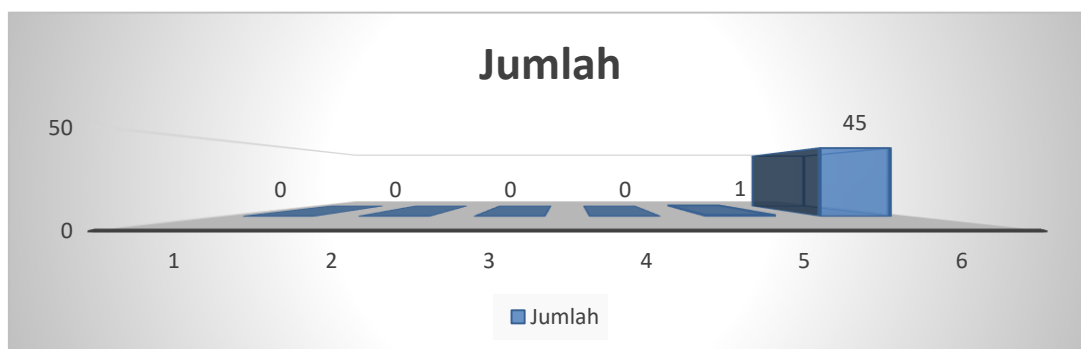
Jawaban Responden

324. Indikator Transparansi Biaya

Dari skala 1 sampai 6, hasil persepsi responden pada indikator Transparansi Biaya ini menunjukkan hasil pada index 5.97.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Militer I-02 Medan bersih dari korupsi.

Tabel 12.
Indeks pada indikator transparansi biaya



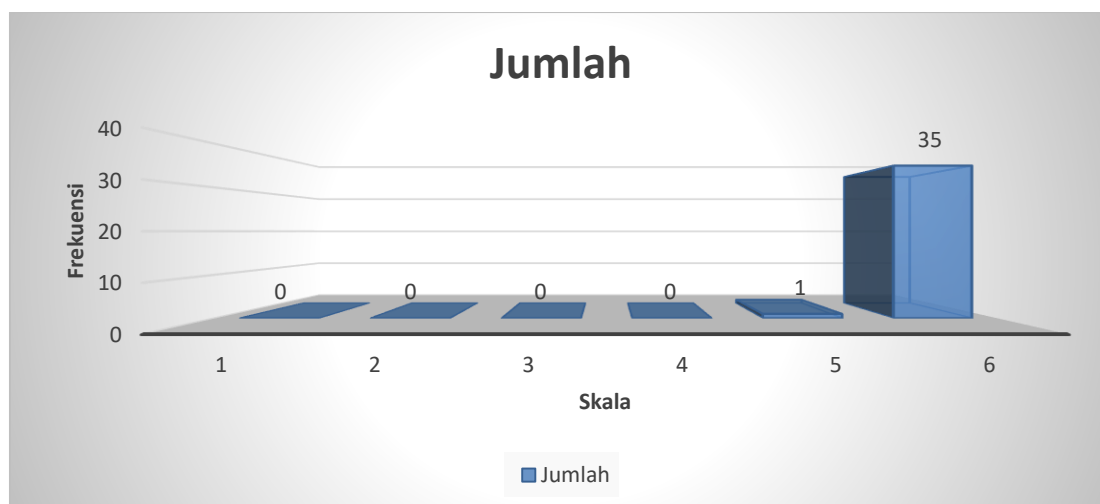
Jawaban Responden

3.25. Indikator Transaksi Rahasia

Dari skala 1 sampai 6, hasil persepsi responden pada indikator Transaksi Rahasia ini menunjukkan hasil pada index 5.97.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Militer I-02 Medan bersih dari korupsi.

Tabel 13.
Tabel indeks pada indikator transaksi rahasia



Jawaban Responden

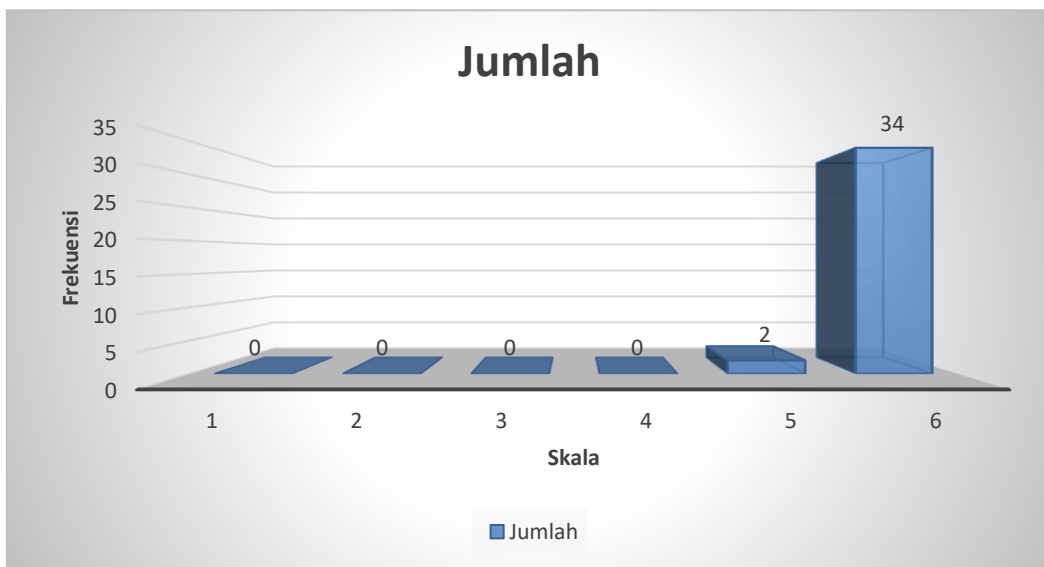
326. Indikator Biaya Tambahan

Dari skala 1 sampai 6, hasil persepsi responden pada indikator Biaya Tambahan ini menunjukkan hasil pada index 5.94.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Militer I-02 Medan bersih dari korupsi.

Tabel 14.

Indeks pada indikator tambahan biaya

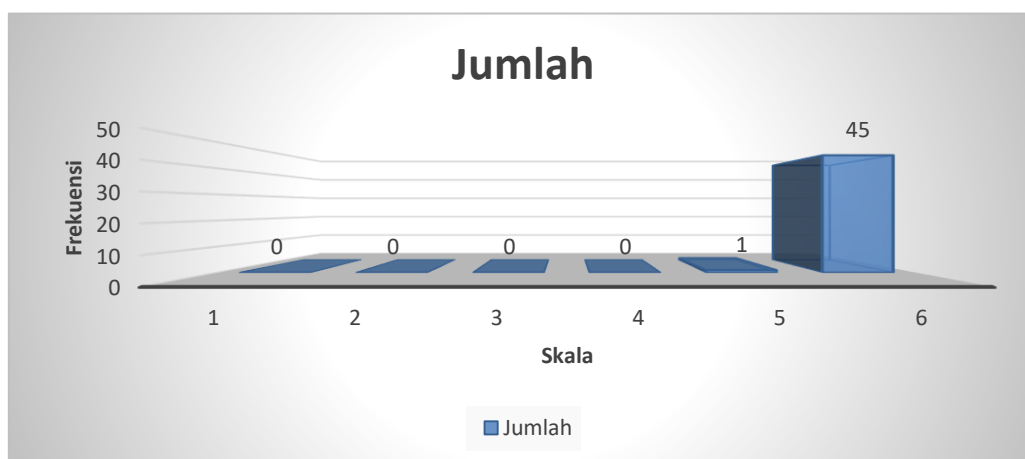


Jawaban Responden

327. Indikator Hadiah

Dari skala 1 sampai 6, hasil persepsi responden pada indikator Hadiah ini menunjukkan hasil pada index 5.97. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Militer I-02 Medan bersih dari korupsi.

Tabel 15.
Indeks pada indikator hadiah



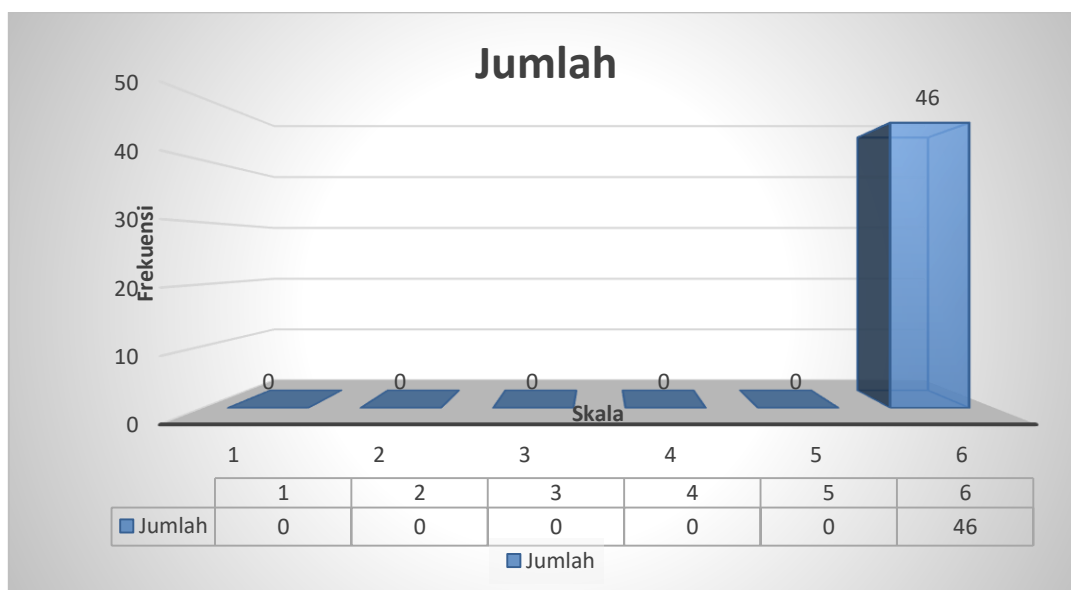
Jawaban Responden

328. Indikator Transparansi Pembayaran

Dari skala 1 sampai 6, hasil persepsi responden pada indikator Transparansi Pembayaran ini menunjukkan hasil pada index 6,00.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Militer I-02 Medan bersih dari korupsi.

Tabel 16.
Indeks pada indikator transparansi Pembayaran

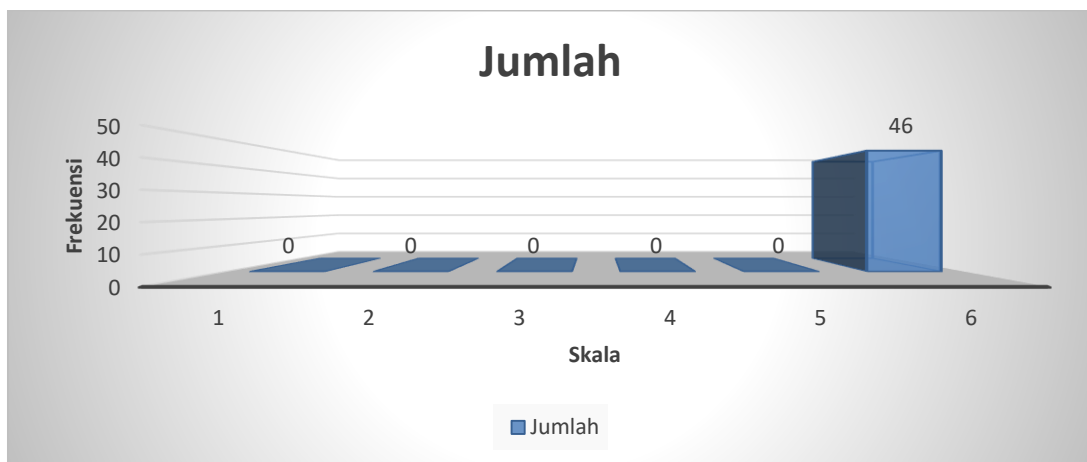


Jawaban Responden

3.2.9. Indikator Percaloan

Dari skala 1 sampai 6, hasil persepsi responden pada indikator Percaloan ini menunjukkan hasil pada index 6,00 .Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Militer I-02 Medan bersih dari tindakan Percaloan.

Tabel 17.
Indeks pada indikator percaloan



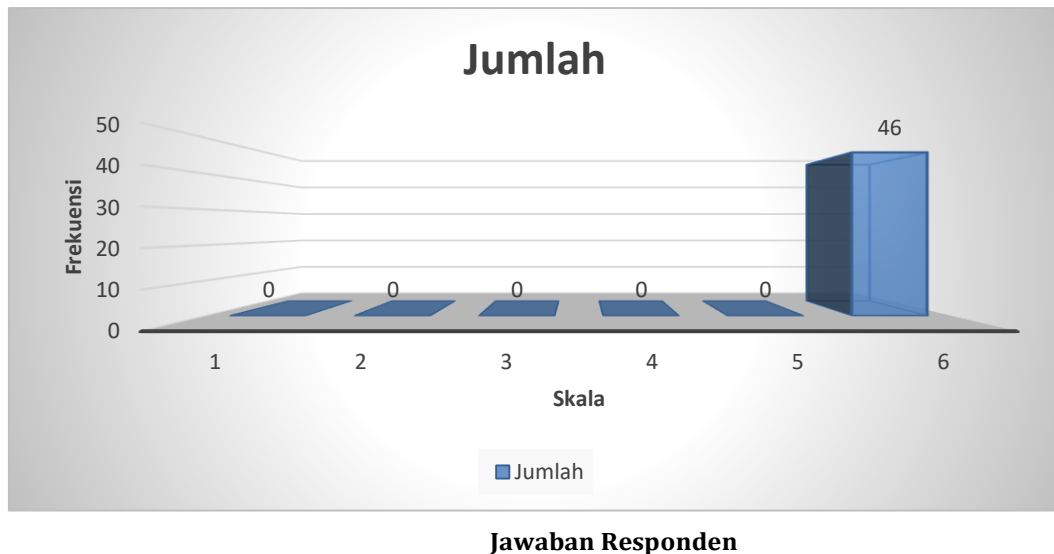
Jawaban Responden

3.2.10. Indikator PerbuatanCurang

Dari skala 1 sampai 6, hasil persepsi responden pada indikator Perbuatan Curang ini menunjukkan hasil pada index 6,00.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Militer I-02 Medan bersih dari korupsi.

Tabel 18.
Indeks pada indikator perbuatan curang



3.3. Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan Militer I-02Medan

Dari indeks 10 indikator tersebut di atas, maka diperoleh Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja Pengadilan Militer I-02 Medan sebesar 5,98.

Indeks **5.98** tersebut jika dikonversikan dalam tabel persepsi di bawah ini, maka skor indeks tersebut masuk pada persepsi kinerja unit pelayanan BERSIH DARI KORUPSI. Nilai interval konversi Indeks Persepsi Korupsi berada pada angka **99,58**.

Tabel 19.
Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada
Pengadilan Militer I-02 Medan

Nilai Persepsi	Nilai Interval Konversi IPK	Mutu	Kinerja
1	0.00 - 17.00	1	Sangat Korupsi
2	17.01 - 33.00	2	Korupsi
3	33.01 - 49.00	3	Cukup bersih dari korupsi
4	49.01 - 65.00	4	Kurang Bersih dari Korupsi
5	65.01 - 81.00	5	Cukup Bersih dari Korupsi
6	81.01 - 100	5	Bersih dari korupsi

3.4. Persepsi responden terhadap kualitas pelayanan Satuan Kerja pada Pengadilan Militer I-02Medan

Selain memberikan output skor Indeks Persepsi Korupsi, survei yang dilakukan ini juga menjaring masukan dari responden berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan pelayanan dan meminimalisir celah Korupsi di Satuan Kerja pada Pengadilan Militer I-02 Medan

Adapun masukan dari responden adalah sebagai berikut :

Tabel 20.

**Isian masukan dan pandangan pengguna layanan
Satuan Kerja pada Pengadilan Militer I-02 Medan**

No	Masukan dan pandangan pengguna layanan Satuan Kerja pada Pengadilan Militer I-02 Medan
1	Meningkatkan pelayanan agar lebih baik lagi
2	Jaga integritas dalam bekerja
3	Agar ditingkatkan kembali Disiplin
4	Agar menyediakan minuman gratis
5	Menyediakan fotocopy gratis

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Dari hasil survei Persepsi Korupsi yang telah dilakukan Satuan Kerja Pengadilan Militer I-02 Medan diperoleh informasi bahwa pada Pengadilan Militer I-02 Medan dalam skala 6 memiliki Indeks Persepsi Korupsi **5,99 (3,99 dalam skala indeks 4)** atau dalam skala 100 adalah **99,93** pada kategori bersih dari korupsi.

Indeks persepsi tersebut merupakan komposit dari indeks 10 indikator yang masing-masing memiliki indeks sebagai berikut:

1. Indikator Manipulasi Peraturan, mendapat indeks 6,00;
2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan, mendapat indeks 6,00;
3. Indikator Menjual Pengaruh, mendapat indeks 6,00;
4. Indikator Transparansi Biaya, mendapat indeks 5,98;
5. Indikator Transaksi Rahasia, mendapat indeks 6,00;
6. Indikator Biaya Tambahan, mendapat indeks 5,98;
7. Indikator Hadiah, mendapat indeks 6,00;
8. Indikator Transparansi Pembayaran, mendapat indeks 6,00;
9. Indikator Percaloan, mendapat indeks 6,00;
10. Indikator Perbuatan Curang, mendapat indeks 6,00;

4.2. Rekomendasi

Merujuk pada hasil indeks persepsi pada setiap indikator terhadap pelayanan di Satuan Kerja Pengadilan Militer I-02 Medan. Triwulan IV Tahun 2022 tersebut di atas, menunjukkan bahwa mayoritas indikator memiliki indeks di atas 5,98 atau masuk pada persepsi bersih dari korupsi. Namun dari sepuluh indikator penyusun tersebut menunjukkan bahwa indikator Manipulasi Peraturan memiliki indeks paling rendah diantara indikator lainnya.

P	SMA	WIRASWASTA	40
L	SMA	WIRASWASTA	39
L	SMA	WIRASWASTA	32
L	SMA	TNI	41
P	SMA	WIRASWASTA	29
L	SMA	WIRASWASTA	45
P	SMA	WIRASWASTA	37
L	SMA	TNI	49
L	SMA	TNI	35
L	SMA	PETANI	48
L	S1	P.SWASTA	29
P	SMA	WIRASWASTA	27
P	SMA	WIRASWASTA	30
L	SMA	TNI	36
P	SMA	IRT	34
P	SMA	IRT	32
L	SMA	WIRASWASTA	44
L	SMA	WIRASWASTA	46
P	SMA	MAHASISWA	20
P	SMA	MAHASISWA	20
P	SMA	MAHASISWA	21
P	SMA	WIRASWASTA	32
P	SMA	WIRASWASTA	38
L	SMA	PETANI	41